

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum (Pemilu) kerap dijadikan sebagai ajang dan sarana pembuktian terwujudnya demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan wadah yang menguji sistem politik yang dianut negara apakah berjalan sesuai dengan asas demokrasi atau tidak. Selain sebagai salah satu instrument politik, pemilu juga menjadi sebuah upaya dalam pemenuhan hak konstitusional seluruh warga negara yang meliputi hak dasar yang dijamin serta diatur dalam sebuah konstitusi yang berlaku di negara tersebut. Hal inilah yang menjadi landasan bagi setiap bentuk tindakan yang dilakukan oleh negara untuk bisa menjamin pemenuhan hak setiap warga negaranya sebagaimana yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945. Dalam hal ini adalah menjamin pemenuhan hak politik tiap individu (Pattipeilohy et al., 2018).

Proses pelaksanaan pemilu harus diikuti dengan partisipasi politik sebagai upaya pemenuhan hak politik yang telah disebutkan diatas. Tingkat rendah dan tingginya partisipasi politik menjadi indikator kualitas dan keberhasilan suatu negara dalam upaya demokratisasi. Maka dari itu partisipasi politik warga negara sangatlah penting dan diperlukan dalam setiap tindakan pemerintah sebagai kontrol terhadap pemangku keputusan dan kebijakan. Keikutsertaan warga negara dalam penyelenggaraan pemilu

merupakan bentuk kecil dari partisipasi politik yang akan berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap bakal calon pemimpin yang terpilih baik itu diranah legislatif maupun eksekutif. Legitimasi yang diberikan masyarakat dalam bentuk hak pilih inilah yang kemudian menjadi rebutan para elit politik untuk kekuasaan. Banyak dari elit politik yang melakukan bermacam strategi untuk “memancing” simpati masyarakat agar memberikan hak pilihnya pada calon atau partai politik (parpol) tertentu. Maka dari itu, pemilu selain menjadi ajang pesta demokrasi juga menjadi ajang unjuk kekuatan elit politik untuk memperoleh kekuasaan.

Partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh kesadaran politik individu itu sendiri. seperti yang dikemukakan oleh Jeffry M. Paige (Surbakti, 2013) bahwa tinggi rendahnya partisipasi dipengaruhi oleh variabel kesadaran politik. Menyadari akan posisi diri sebagai warga negara dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan awal dari kesadaran politik sehingga ia akan memenuhi kewajibannya untuk ikut serta terlibat dalam aktivitas politik seperti halnya pemilu. Dengan begitu akan memunculkan partisipasi politik yang semakin meningkat jika setiap individu memiliki kesadaran untuk terlibat dalam proses politik dengan tujuan membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk negara.

Upaya untuk mencapai angka partisipasi yang tinggi, perlu adanya stimulus yang bisa memunculkan kesadaran akan politik itu sendiri. Maka dari itu perlu adanya pengetahuan dan pendidikan politik yang mumpuni.

Seperti pada saat pemilu diselenggarakan, setiap warga yang memiliki hak suara perlu dibekali pengetahuan dan pendidikan politik agar dapat menentukan pilihan politiknya dengan bijak. Pendidikan politik akan membuka wawasan masyarakat untuk lebih selektif dan rasional dalam memberikan hak suaranya pada saat pemilu diselenggarakan. Individu yang telah dibekali dengan pendidikan politik akan secara sadar untuk menggunakan hak pilihnya dalam upaya menjalankan kewajibannya sebagai warga negara (Alamsyah, M. Indra Putra, 2021).

Pendidikan politik adalah hak yang harus diperoleh oleh setiap lapisan masyarakat tanpa adanya pengecualian. Upaya mewujudkan partisipasi politik melalui pemilu jelas dibutuhkan pendidikan politik agar terhindar dari setiap bentuk mobilisasi oknum politik yang tidak bertanggungjawab. Maraknya praktik politik uang (*Money Politic*) yang menghiasi realitas kehidupan politik negara Indonesia, menjadi salah satu contoh mengapa pendidikan politik itu penting untuk didapatkan setiap warga negara. Maka dari itu, penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk dibekali pendidikan politik karena hal tersebut merupakan langkah awal bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, arah serta sikap politik mereka ke depannya terutama dalam proses pemilu. Keberhasilan dan kualitas pemilu dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan juga dilihat melalui sejauh mana mereka menggunakan hak pilih tersebut atas kesadaran sebagai pemilih.

Pendidikan politik diperlukan sebagai upaya dalam menyampaikan pemahaman politik kepada setiap individu yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membangkitkan naluri untuk ikut serta dalam proses politik, karena itulah proses pemberian pengetahuan dan pendidikan politik kepada masyarakat bisa diperoleh darimana saja baik secara formal maupun informal. Keluarga, sekolah, partai politik, dan media massa merupakan sarana pendidikan politik yang paling esensial khususnya dalam penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan lembaga politik dalam proses pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya mengenai pemilu sangatlah penting karena sudah menjadi tanggungjawab yang tidak bisa dihindari (Handoyo & Lestari, 2017).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga representasi negara dalam pelaksanaan pemilu sejak era reformasi berlangsung, lebih tepatnya pada tahun 1999. Selain berfungsi sebagai penyelenggara pemilu, KPU merupakan salah satu lembaga politik yang berperan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih merupakan tugas KPU sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. KPU menjadi salah satu agen sosialisasi politik yang memberikan pengetahuan

kepada masyarakat khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu kepada calon serta pemilih yang telah terdaftar. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik tersebut dilakukan KPU dengan membentuk suatu program bernama Relawan Demokrasi. Relawan Demokrasi ini terbentuk berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tepatnya pada pasal 15 ayat (2) huruf (f) yang menjelaskan bahwa pemberian pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan membentuk agen atau relawan demokrasi.

Relawan Demokrasi merupakan program gerakan sosial inovasi yang dibuat oleh KPU dalam menekan angka Golongan Putih (golput) di tengah masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi politik terkait pemilu. Minimnya sosialisasi politik ini menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi politik masyarakat (Saban & Wijaya, 2018). Hal inilah yang menginisiasi KPU untuk membentuk program Relawan Demokrasi untuk mendongkrak angka partisipasi politik khususnya partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu berdasarkan asas pemilu yakni Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil). Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitasnya.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu agen sosialisasi politik, Relawan Demokrasi ini tersebar dalam 11 basis pemilih. Adapun ke-11 basis pemilih tersebut

---

<sup>1</sup> Keputusan KPU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Relawan Demokrasi (<https://jdih.kpu.go.id>)

adalah: Basis Keluarga, Pemilih Muda, Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Disabilitas, Pemilih Berkebutuhan Khusus, Kelompok Marjinal, Komunitas atau Organisasi, Basis Keagamaan, Basis Warga Internet (Warganet) dan terakhir Basis Relawan Demokrasi itu sendiri. Pembagian Relawan Demokrasi dalam beberapa segmen ini bertujuan untuk menjangkau ke-11 basis tersebut yang nantinya akan diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya memberikan hak suara dengan bijak dan optimal pada saat Pemilu diselenggarakan. Pembagian segmen tersebut merupakan strategis baik dari kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial-politik berbangsa dan bernegara.

Relawan Demokrasi berperan dalam memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada setiap basis yang telah disebutkan. Pemberian pendidikan politik kepada pemilih ini bertujuan untuk menyadarkan akan pentingnya hak suara yang dimiliki untuk keberlangsungan pemerintahan selanjutnya. Efek yang lebih jauh dari pendidikan politik oleh Relawan Demokrasi ini adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Masyarakat diharapkan dapat memberikan perhatian dan mampu untuk ikut terlibat dalam setiap proses keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga asas demokrasi yang menggaungkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat terwujud.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang berbeda dengan rangkaian pemilu yang pernah terjadi sebelumnya. Pada pemilu

sebelumnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan diwaktu yang berbeda dengan pemilihan Wakil rakyat (legislatif). Sedangkan pada pemilu tahun 2019, teknis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan diwaktu yang bersamaan dengan pemilihan legislatif dari tingkat nasional sampai Kota/Kabupaten yakni pada tanggal 17 April tahun 2019. Hal ini menuntut KPU untuk semakin gencar dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. Untuk mencapai target partisipasi yang diharapkan, setiap Kota/Kabupaten di seluruh wilayah Indonesia membentuk Relawan Demokrasi sesuai dengan arahan KPU RI dalam Surat Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi pemilu Serentak 2019 pada tanggal 9 Januari 2019.

Begitupun dengan Kota Tasikmalaya, pada pemilu tahun 2019 KPU Kota Tasikmalaya membentuk Relawan Demokrasi untuk menjangkau seluruh basis pemilih di Kota Tasikmalaya. KPU Kota Tasikmalaya membuka rekrutmen pada tanggal 10 Januari 2019 dan melakukan seleksi *interview* pada tanggal 19 Januari 2019. Hasil seleksi terdapat 55 orang Relawan Demokrasi yang lolos dari 75 pendaftar. Jumlah ini disesuaikan dengan basis yang terdaftar dalam DPT dengan minimal 4 orang relawan setiap basis. Pada tanggal 21 Januari tahun 2019, Ketua KPU Kota Tasikmalaya Ade Zaenul Mutaqin melantik sekaligus memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Relawan Demokrasi terpilih. Setiap basis memiliki koordinatornya masing-masing, adapun

koordinator setiap basis Relawan Demokrasi Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Nama Koordinator Basis Relawan Demokrasi**

<b>NO</b>	<b>BASIS</b>	<b>NAMA KOORDINATOR</b>
1	Keluarga	Ika Nur Rohmah S.Pd
2	Pemula	Aris Ramdan
3	Muda	Hilda Restu Munggaran
4	Komunitas	Gani Pratama
5	Perempuan	D. Risma Triana
6	Berkebutuhan khusus	Ayi Ardhi Hidayat
7	Warga internet	Agus Mulyana
8	Disabilitas	Anita Puspita Sari
9	Keagamaan	Agus Setiana
10	Marjinal	Eva Fatimah, S.Km

*Sumber: KPU Kota Tasikmalaya*

Tugas dan fungsi utama dari Relawan Demokrasi ini adalah memberikan pengarahan kepada setiap basis pemilih dengan. Mengingat teknis pemilu tahun 2019 ini ada lima surat suara yang harus diisi oleh para pemilih dan sedikit membuat masyarakat kebingungan, maka para Relawan Demokrasi beserta KPU Kota Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada setiap basis pemilih untuk memberikan pemahaman secara jelas dan konsisten mengenai teknik penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Pembentukan Relawan Demokrasi ini dilatarbelakangi oleh penurunan angka partisipasi pemilih yang terlihat menurun dalam empat pemilu nasional dan pemilukada terakhir, adapun angka partisipasi di Kota Tasikmalaya sendiri yaitu:

**Tabel 1.2 Gelaran Politik Elektoral di Kota Tasikmalaya**

<b>Tahun</b>	<b>2012 (Pilkada)</b>	<b>2014 (Pemilu)</b>	<b>2017 (Pilkada)</b>	<b>2019 (Pemilu)</b>
<b>Angka Partisipasi</b>	81,38%	83,05%	81,65%	87,49%

*Sumber: KPU Kota Tasikmalaya*

Secara keseluruhan partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam rangkaian pemilu terlihat fluktuatif. Bisa dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pilkada 2012 sebesar 81,38%, dan pemilu tahun 2014 mengalami kenaikan dengan angka partisipasi 83,05%. Pilkada tahun 2017 mengalami penurunan dengan angka 81.65%. Kemudian pada pemilu serentak tahun 2019 meningkat jadi 87,49%. Angka partisipasi ini berhasil melampaui angka yang ditargetkan oleh KPU Kota Tasikmalaya sebelumnya dan berhasil menduduki peringkat pertama dengan angka partisipasi pemilih tertinggi se-Jawa Barat.

Adanya Relawan Demokrasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pemilu karena melihat inflasi kualitas memilih yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya maka Relawan Demokrasi ini tidak semata-mata meningkatkan partisipasi begitu saja. Harapan akan teredukasinya masyarakat melalui program Relawan Demokrasi ini jelas bukan hal yang

mudah, adanya upaya dan strategi yang digunakan untuk menggenjot partisipasi masyarakat, selain itu juga apakah Relawan Demokrasi ini menghadapi kendala-kendala yang memerlukan solusi untuk menyelesaikannya.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **Lengkoan** (2020) dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Bitung”. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui apakah program Relawan Demokrasi bisa meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bitung dan menjelaskan faktor-faktor penghambatnya. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengetahui implementasi Relawan Demokrasi dalam meningkatnya partisipasi pemilih di Kota Tasikmalaya pada Pemilu tahun 2019.

Selain itu penelitian terdahulu terkait fokus penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **Alamsyah** (2021) yang berjudul “Analisis Sosialisasi Politik Relawan Demokrasi Basis Warga Internet Kota Medan Pemilihan Umum Tahun 2019”. Penelitian ini membahas mengenai peran Relawan Sosialisasi dalam pelaksanaan Sosialisasi kepada masyarakat, selain itu dalam penelitian ini menjelaskan mengenai pola-pola sosialisasi yang dilaksanakan. Relevansi dengan penulis adalah terkait pola sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi kepada Masyarakat. Yang membedakan adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu

hanya terfokus pada satu segmen masyarakat saja yakni Basis Warga Internet, sedangkan penulis tidak memfokuskan pada salah satu segmen. Penelitian terdahulu lainnya ialah penelitian oleh **Pulungan** (2020), dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”. Hasil dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat.

Untuk mencapai angka partisipasi yang tinggi bukanlah hal yang mudah. KPU bersama Relawan Demokrasi Kota Tasikmalaya memiliki beban tersendiri untuk membuat pemilu tahun 2019 ini sukses dan berkualitas, karena pemilu serentak ini menjadi peristiwa baru dalam proses politik di Indonesia. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk lebih lanjut dalam meneliti mengenai bagaimana implementasi Relawan Demokrasi Kota dalam mendongkrak partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya pada Pemilu tahun 2019. Pada dasarnya adanya program Relawan Demokrasi ini sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang terbagi kedalam beberapa segmen, sehingga mampu mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan jauh lebih baik dari Pemilu yang pernah dilaksanakan sebelumnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan diulas yaitu **“Bagaimana implementasi Relawan Demokrasi dalam meningkatnya partisipasi pemilih masyarakat Kota Tasikmalaya pada Pemilu tahun 2019?”**

## **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini penyusun membeikan batasan masalah agar pembahasan dan analisis tetap terfokus dalam rangka menjawab rumusan masalahan yang ada. Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah mengenai efektivitas dan efesiensi Relawan Demokrasi dalam memberikan sosialisasi serta pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2019.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Relawan Demokrasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat Kota Tasikmalaya pada saat pemilu tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efesiensi Relawan Demokrasi yang dibuat oleh KPU.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan diatas dapat ditafsirkan manfaat penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan referensi bagi dunia akademik khususnya bidang Ilmu Politik mengenai kajian tentang implementasi lembaga politik khususnya KPU dan Relawan Demokrasi dalam meningkatnya partisipasi masyarakat sehingga bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas.

### 2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi KPU dan Relawan Demokrasi untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang telah ada sehingga semakin meningkatkan partisipasi pemilih.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi agen sosialisasi politik untuk lebih intens dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas.